



RENCANA KERJA

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

— 2024 —

TIM PENYUSUN

Pengarah

Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr. MP

Penanggung Jawab

Andi Ariani, SE, M.Si

Penulis Naskah dan Pengolah Data

Syafia Nur Rosanti, ST, M.Energy.Sys

Delfry Depanty, ST

Wahyu Hidayat, S.STP, M.AP

Hendrik Gunawan Baretha, S.Pd

Yayan Virgiansyah, S.Sos

Hafis Husein Harate

Moh. Rifai, SH

Ersa Fahreza, S.M.

Yuliana Nur, SKM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan pedoman dan rujukan dalam Menyusun program dan kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan. Dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Dokumen Renja ini juga dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa mendatang oleh para pemimpin dan *stakeholder*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen renja ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan, khususnya sector energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 29 Desember 2023

**Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah**




Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19691016 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

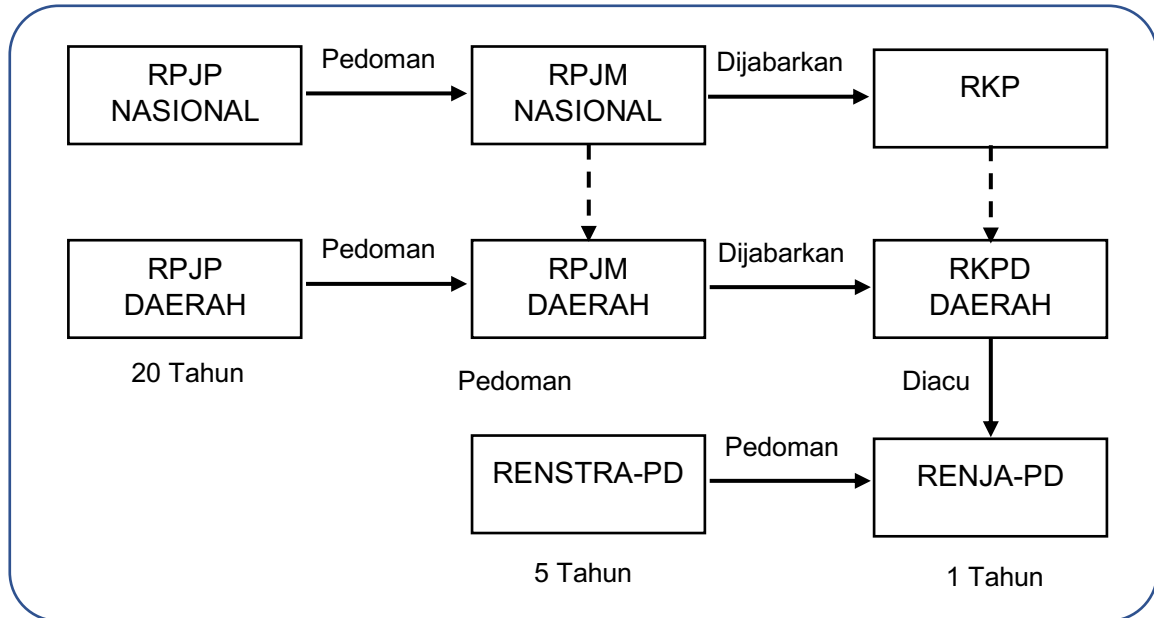
1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas ESDM periode 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja. Evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Penyusunan rancangan awal Renja mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu.

Penyempurnaan rancangan awal Renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja diverifikasi oleh BAPPEDA yang kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada began alur perencanaan pembangunan daerah yang disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah peraturan tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM pada tahun 2024
- Menetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan bersama dengan pagu indikatif tahun anggaran 2024 untuk pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dari Dokumen Renja Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun 2023, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi dan realisasi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2022 yaitu:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, dimana target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	%	30	24,7	82,3%
1. Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	WIUP	30	5	16,7%
Sub Keg: - Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil	Dokumen	5	3	60,0%
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah provinsi	IUP	50	17	34,0%
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian					
1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					
Sub Keg: - Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi layanan perizinan air tanah	Rekomendasi	5	0	0,0%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan					
1. Kegiatan: Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	- Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik - Jumlah dokumen persetujuan RUPTL - Jumlah dokumen persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi	dokumen	1	0	0%
Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	Laporan	1	0	0%
2. Kegiatan: Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	%	1,63	1,1	67%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan					
1. Kegiatan: Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa penunjang EBT yang telah memiliki SKTUJP dalam wilayah provinsi	SKTUJP	5	0	0%
Sub Kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin dan informasi SKTUJP	rekomendasi	2	0	0%

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Untuk kegiatan yang tepat memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara					
Kegiatan:					
1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					
Sub Kegiatan:					
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengendalian pemanfaatan Wilayah izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil	Laporan	4	4	100%
2. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					
Sub Kegiatan:					
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan IUP Mineral Logam dan Batubara	Laporan	4	4	100,0%
- Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah laporan pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik	Laporan	5	5	100,0%
3. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
Sub Kegiatan:					
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	2	2	100,0%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan IPR	Dokumen	1	1	100,0%
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan, sosial dan ekonomi	%	8,82	8,82	100,0%
Kegiatan:					
1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah	kab/ kota	7	7	100,0%
Sub Kegiatan:					
- Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	dokumen	1	1	100,0%
- Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	dokumen	1	1	100,0%
2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	kab/kota	3	3	100,0%
Sub Kegiatan:					
- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang terkumpul	dokumen	3	3	100,0%
- Perhitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	3	3	100,0%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	98,84	98,84	100,0%
1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan prosedur dan persyaratan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	1	100,0%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100,0%
2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	IO	65	65	100,0%
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	1	100,0%
3. Kegiatan: Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi terkait dokumen data dan informasi terkait harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari Pemegang izin yang ditetapkan oleh provinsi	Dokumen	1	1	100,0%
4. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah kebijakan terkait penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Dokumen	1	1	100,0%
5. Kegiatan: Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					
Sub Kegiatan:					
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	Laporan	1	1	100,0%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Program Pengelolaan Energi Terbarukan					
1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah pemanfaatan langsung panas bumi yang telah memiliki izin dalam wilayah provinsi	Lokasi	1	1	100,0%
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan inventarisasi potensi panas bumi	Laporan	3	3	100,0%
2. Kegiatan: Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi penetapan prosedur dan persyaratan SKTUJP perusahaan EBT	Laporan	4	4	100,0%
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dibina terkait SKTUJP	Perusahaan	2	2	100,0%
3. Kegiatan: Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan inventarisasi potensi BBN	Laporan	2	2	100,0%
4. Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Perumusan dan Penerapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur EBT	dokumen	1	1	100,0%

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara					
Kegiatan:					
1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					
Sub Kegiatan:					
- Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	Laporan	20	21	105,0%
2. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat					
Sub Kegiatan:					
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	Laporan	2	3	150,0%
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian					
Kegiatan:					
1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	Laporan	4	6	150,0%
2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	titik	13	17	130,8%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan					
1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar	IUPTL	1	7	700,0%
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis Izin Operasi	Rekomendasi	5	7	140,0%
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Laporan	6	10	166,7%
3. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri	IUJPTL	54	70	129,6%
4. Kegiatan: Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					
Sub Kegiatan:					
- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	keluarga	660	1435	217,4%
- Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	unit	660	1435	217,4%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan					
	Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	4	5	125,0%
1. Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					
Sub Kegiatan:					
- Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun	Watt	29290	36680	125,2%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan:

- Adanya pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dimana kewenangan pemerintah daerah atas perizinan mineral logam dan batubara ditarik ke pemerintah pusat sehingga kewenangan pemerintah daerah menjadi berkurang;
- Adanya keterlambatan aturan dan teknis penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pusat terkait layanan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah sehingga proses pelaksanaan kegiatan terhambat.
- Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diikuti oleh terbitnya PP 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Badan Usaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam pelayanan perizinan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan:

- Kegiatan telah direncanakan dengan baik
- Proses pengadaan telah sesuai dengan timeline yang telah ditentukan

Faktor-faktor penyebab terlampaunya target kinerja program/ kegiatan:

- Adanya penambahan anggaran pada saat penyusunan APBD Perubahan
- Adanya koordinasi yang baik antara Dinas ESDM dengan instansi-instansi terkait yang mendukung pencapaian target kinerja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- Meningkatnya pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan, sosial dan ekonomi

- Meningkatnya pembangunan energi baru terbarukan
 - Meningkatnya rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah
 - Meningkatnya persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:
- Perencanaan anggaran dan target kinerja perlu ditingkatkan lagi
 - Kegiatan-kegiatan prioritas seperti kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung harus didahulukan
 - Koordinasi antara Dinas ESDM, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan lagi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	29	01	1.01	03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	2 dok	2 dok	5 dok	250,00
3	29	01	1.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok	7 dok	21 dok	300,00
3	29	01	1.01	05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	14 dok	14 dok	7 dok	7 dok	100	14 dok	14 dok	35 dok	250,00
3	29	01	1.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100	2 Lap	2 Lap	8 Lap	266,67
3	29	01	1.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	36 Lap	300,00
3	29	01	1.02		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	6 Dok	300,00
					Sub Kegiatan:										
3	29	01	1.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	105 org/bulan	103 org/bulan	105 org/bulan	103 org/bulan	98,10	100 org/bulan	96 org/bulan	302 org/bulan	287,62
3	29	01	1.02	05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	3 Lap	300,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 29 01 1.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	36 Lap	300,00
3 29 01 1.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	8 Lap	8 Lap	2 Lap	2 Lap	100	4 Lap	1 Lap	11 Lap	137,50
	Sub Kegiatan:										
3 29 01 1.03 03	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	2 Lap	2 Lap	0 Lap	0 Lap	-	Lap	Lap	2 Lap	100,00
3 29 01 1.03 04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	5 Lap	5 Lap	6 Lap	120	4 Lap	4 Lap	15 Lap	375,00
3 29 01 1.03 05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	Lap	Lap	2 Lap	200,00
3 29 01 1.05	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 dok		1 dok	1 dok	100,00	1 dok	1 dok	2 dok	200,00
	Sub Kegiatan:										
3 29 01 1.05 04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	3 dok	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100,00	1 dok	1 dok	5 dok	166,67
3 29 01 1.05 05	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	6 Lap	1 dok	1 Lap	100	1 dok	1 dok	8 dok	800,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 29 01 1.05 09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Org	4 orang	3 orang	3 orang	100	4 orang	10 orang	17 orang	340,00
3 29 01 1.05 10	- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Org	0 orang	50 orang	50 orang	100			50	166,67
3 29 01 1.06	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	9 Lap	8 Lap	9 Lap	8 Lap	88,8889	8 Lap	1 Lap	17 Lap	188,89
	Sub Kegiatan:										
3 29 01 1.06 01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	3 paket	300,00
3 29 01 1.06 02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	1 paket	2 paket	2 paket	100	1 paket	1 paket	4 paket	200,00
3 29 01 1.06 03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	2 paket	2 paket	100	1 paket	1 paket	4 paket	400,00
3 29 01 1.06 04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	3 paket	300,00
3 29 01 1.06 05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	3 paket	300,00
3 29 01 1.06 06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	3 dok	300,00
3 29 01 1.06 08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 paket	100	1 Lap	1 Lap	3 Lap	300,00

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 29 01 1.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 Lap	8 Lap	11 Lap	11 Lap	100,00	1 Lap	1 Lap	20 Lap	181,82
3 29 01 1.07	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Lap	3 Lap	2 Lap	3 Lap	150	3 Lap	1 Lap	7 Lap	233,33
	Sub Kegiatan:										
3 29 01 1.07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	1 unit	6 unit	6 unit	100	2 unit	2 unit	9 unit	180,00
3 29 01 1.07 05	- Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100	1 paket	1 paket	7 paket	700,00
3 29 01 1.07 06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	11 unit	7 unit	7 unit	100	23 unit	23 unit	41 unit	410,00
3 29 01 1.08	7. Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Lap	4 Lap	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	1 Lap	8 Lap	200,00
	Sub Kegiatan:										
3 29 01 1.08 01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Lap	1 Lap	3 Lap	3 Lap	100	1 Lap	1 Lap	5 Lap	500,00
3 29 01 1.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	3 Lap	300,00
3 29 01 1.08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	3 Lap	300,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	29	01	1.09		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	3 Lap	9 Lap	300,00
					Sub Kegiatan:										
3	29	01	1.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	16 unit	20 unit	23 unit	115	23 unit	13 unit	52 unit	325,00
3	29	01	1.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	69 unit	37 unit	69 unit	186,49	46 unit	54 unit	192 unit	384,00
3	29	01	1.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	1 unit	2 unit	200	5 unit	5 unit	10 unit	333,33
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	3,33 %			%		3,33 %	1,25 %	1,25 %	37,54
					Kegiatan:										
3	29	02	1.01		1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah	9 kab/kota	6 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota	100	9 kab/kota	7 kab/kota	20 kab/kota	222,22
					Sub Kegiatan:										
3	29	02	1.01	01	- Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	3 Dok	300,00
3	29	02	1.01	02	- Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	0 Dok	2 Dok	200,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 29 02 1.01 03	- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	4 Lap	6 Lap	4 Lap	6 Lap	150	4 Lap	5 Lap	17 Lap	425,00
3 29 02 1.02	2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	58 perusahaan	63 perusahaan	53 perusahaan	63 perusahaan	118,868	58 perusahaan	3 perusahaan	129 perusahaan	222,41
	Sub Kegiatan:										
3 29 02 1.02 01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	8 titik	7 titik	13 titik	17 titik	130,769	3 titik	3 titik	27 titik	337,50
3 29 02 1.02 02	- Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi layanan Perizinan Air Tanah	5 rekomendasi	4 rekomendasi	5 rekomendasi	0 rekomendasi	0,0	5 rekomendasi	3 rekomendasi	7 rekomendasi	140,00
3 29 02 1.03	3. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPAnya	2 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	100	2 kab/kota	2 kab/kota	8 kab/kota	400,00
	Sub Kegiatan:										
3 29 02 1.03 01	- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	3 dok		3 dok	3 dok		1 dok	1 dok	4 dok	133,33

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
									Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	29	02	1.03	02	- Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan NPA dalam daerah provinsi	3 Lap	2 Lap	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	3 Lap	8 Lap	266,67
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40 %		30 %	24,7	82,3333	40 %	27 %	51,7 %	129,25
					Kegiatan:										
3	29	03	1.02		1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral logam dan batubara dalam daerah provinsi	75 IUP	54 IUP	65 IUP	IUP	0	40 IUP	IUP	54 IUP	72,00
					Sub Kegiatan:										
3	29	03	1.02	04	- Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik	6 Lap	4 Lap	5 Lap	5 Lap	100	4 Lap	4 Lap	13 Lap	216,67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	29	03	1.03		2. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	70 IUP	34 IUP	50 IUP	41 IUP	82	30 IUP	60 IUP	135 IUP	192,86
					Sub Kegiatan:										
3	29	03	1.03	02	- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	3 Lap	1 Lap	2 Lap	2 Lap	100	4 Lap	5 Lap	8 Lap	266,67
3	29	03	1.03	05	- Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil Pengawasan kaidah teknis pertambangan yang baik dan kaidah pengusaha yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	20 Lap	6 Lap	20 Lap	21 Lap	105	5 Lap	5 Lap	32 Lap	160,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	29	03	1.04		3. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	- Jumlah IPR dalam wilayah provinsi	20 IPR	0 IPR	10 IPR	27 IPR	270	15 IPR	19 IPR	46 IPR	230,00
					Sub Kegiatan:										
3	29	03	1.04	02	- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	3 Lap	2 Lap	2 Lap	3 Lap	150,00	4 Lap	4 Lap	9 Lap	300,00
3	29	03	1.10		4. Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya	5 Dok			Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	20,00
					Sub Kegiatan:										
3	29	03	1.10	01	- Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait kepemilikan Izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	5 Lap			Lap		3 Lap	2 Lap	2 Lap	40,00
3	29	03	1.24		5. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah IUP yang dibina dan diawasi	10 IUP			IUP		5 IUP	6 IUP	6 IUP	60,00
					Sub Kegiatan:										
3	29	03	1.10	01	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	1 Dok			Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	29	05													
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN															
Kegiatan:															
3	29	05	1.01		1. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah pemanfaatan langsung panas bumi yang telah memiliki izin dalam wilayah provinsi	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	100,00
Sub Kegiatan:															
3	29	05	1.01	01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Panta ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan inventarisasi potensi panas bumi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	300,00
Sub Kegiatan:															
3	29	05	1.02		2. Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Jasa Penunjang EBT yang telah memiliki SKTUJP dalam wilayah provinsi	7 SKTUJP	0	5 SKTUJP	0	0,00	5 SKTUJP	5 SKTUJP	5 SKTUJP	71,43
Sub Kegiatan:															
3	29	05	1.02	01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi penetapan prosedur dan persyaratan SKTUJP Pengusahaan EBT	4 Lap	2 Lap	4 Lap	4 Lap	100,00	4 Lap	4 Lap	10 Lap	250,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023			
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
3	29	05	1.02	02	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin dan informasi SKTUJP	2 rekomendasi	0	0,00	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100,00
3	29	05	1.02	03	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dibina terkait SKTUJP	2 perusahaan		100,00	2 perusahaan	2 perusahaan	4 perusahaan	200,00
3	29	05	1.03		3. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN	2 perusahaan	0 perusahaan	100,00	2 perusahaan	2 perusahaan	4 perusahaan	200,00
					Sub Kegiatan:								
3	29	05	1.03	01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan inventarisasi potensi BBN	2 Lap	4 Lap	100	3 Lap	3 Lap	9 Lap	450,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		- Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00				
3	29	05	1.04		4. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	6 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat	6 kelompok masyarakat	6 kelompok masyarakat	100	6 kelompok masyarakat	6 kelompok masyarakat	13 kelompok masyarakat	216,67
					Sub Kegiatan:										
3	29	05	1.04	01	- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur EBT	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	4 Dok	400,00
3	29	05	1.04	04	- Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun	13500 Watt		29290 Watt	36680 Watt	125	59190 Watt	59190 Watt	95870 Watt	710,15
3	29	05	1.04	06	- Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	40 org	0	40 org	40	100	40 org	40 org	80 org	200,00
3	29	05	1.04	07	- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi konservasi energi	2 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100	1 Dok	1 Dok	4 Dok	200,00
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	99,14 %	97 %	98,84 %	98,85 %	100,01	99,14 %	99,14 %	99,14 %	100,00
					Kegiatan:										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023						
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	29	06	1.01		1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	- Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar	3 IUPTL	0		1 IUPTL	7	700,00	3 IUPTL	9 IUPTLS	16 IUPTLS	533,33
					Sub Kegiatan:											
3	29	06	1.01	01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	3 Dok	300,00
3	29	06	1.01	03	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 Lap		1 Lap	1 Lap	100		2 Lap	4 Lap	5 Lap	250,00
3	29	06	1.02		2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	70 IO	7 IO	65 IO	65 IO	100		70 IO	183 IO	255 IO	364,29
					Sub Kegiatan:											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 29 06 1.02 01	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	3 dok	300,00
3 29 06 1.02 02	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Operasi	5 reko men dasi		5 reko men dasi	7 reko men dasi	140	6 reko men dasi	9 reko men dasi	16 reko men dasi	320,00
3 29 06 1.02 03	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	8 Lap		6 Lap	10 Lap	167	7 Lap	10 Lap	20 Lap	250,00
3 29 06 1.04	3. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	- Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik - Jumlah Dokumen Persetujuan RUPTL - Jumlah Dokumen Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemilik Izin Operasi	1 dok 1 dok 1 dok	0 0 0	1 dok 1 dok 1 dok	0 dok 0 dok 0 dok	0 0 0	1 dok 1 dok 1 dok	0 dok 0 dok 0 dok	0 dok 0 dok 0 dok	0,00 0,00 0,00
		Sub Kegiatan:									
3 29 06 1.04 01	- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi terkait harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh provinsi	1 dok		1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	2 dok	200,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 29 06 1.04 03	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Harga Jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, RUPTL, dan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	4 Lap	3 Lap	3 Lap	1 Lap	33	1 Lap	3 Lap	7 Lap	175,00
3 29 06 1.05	4. Penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri	59 IUJPTL		54 IUJPTL	70 IUJPTL	130	59 IUJPTL	70 IUJPTL	140 IUJPTL	237,29
	Sub Kegiatan:										
3 29 06 1.05 01	- Penetapan prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah kebijakan terkait penetapan prosedur dan persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
3 29 06 1.05 03	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0	5 Lap	4 Lap	4 Lap	80,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Realisasi program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023					
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	29	06	1.06		5. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63 %	0,48 %	1,63 %	1,1 %	67	3,63 %	1,84 %	3,42 %	94,21
					Sub Kegiatan:										
3	29	06	1.06	02	- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	260 keluar ga	628 keluar ga	660 keluar ga	1435 keluar ga	217	1844 keluar ga	1844 keluar ga	3907 keluar ga	1502,69
3	29	06	1.06	05	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1 Lap	0	1 Lap	1 Lap	100	2 Lap	2 Lap	3 Lap	300,00
3	29	06	1.06	06	- Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	260 unit	628 unit	660 unit	1435 unit	217	1844 unit	1844 unit	3907 unit	1502,69

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tingkat capaian kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tengah

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral dalam PDRB	14	15	15	15	15,37	15,59	15	15	Nilai persentase PDRB sampai dengan TW III tahun 2023. Nilai persentase PDRB per TW IV Tahun 2023 belum dirilis oleh BPS
2.	Nilai Kontribusi Sektor pertambangan mineralba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (milyar rupiah)	200	220	370	400	328	360	370	400	Estimasi nilai DBH per Desember 2023. Realisasi nilai DBH Tahun 2023 baru akan dihitung pada rekonsiliasi PNPB di TW I tahun 2024
3.	Rasio Ketersediaan Energi Sulawesi Tengah	85%	86%	86	87	81%	86,16%	86	87	
4.	Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	15%	18%	20%	23%	17,39%	11,11%	20%	23%	Porsi EBT dalam bauran energi tahun 2023 masih merupakan hasil perhitungan sementara
5.	Persentase Desa Teraliri Listrik	99,90%	100%	100%	100%	99,90%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Zona Konservasi Air Tanah dalam Cekungan Air Tanah yang telah Ditetapkan	91,18%	91,18%	100%	100%	91,18%	73,53%	100%	100%	
7.	Indeks Reformasi Birokrasi		64	66	68		64	66	68	Realisasi Indeks RB tahun 2023 masih menggunakan nilai target

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan program dan kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain:

1. Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah masih di bawah target nasional. Rasio elektrifikasi pada tahun 2022 adalah 98,85% sedangkan target rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2022 adalah 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Rendahnya fasilitasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya bagi masyarakat tidak mampu
 - Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan di sektor ketenagalistrikan
 - Kurang komprehensifnya perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Masih minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan yaitu sekitar 17,39% dari pemanfaatan energi yang ada (data tahun 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Masih kurangnya dokumen perencanaan pengembangan energi baru terbarukan
 - Masih rendahnya penyediaan infrastruktur energi baru terbarukan khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan terisolir
 - Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konservasi energi
 - Kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan
3. Belum optimalnya pemanfaatan air tanah

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan air tanah
- Belum semua kabupaten/ kota telah menetapkan nilai perolehan air tanah

- Belum lengkapnya pemetaan zona konservasi air tanah di daerah Sulawesi Tengah
 - Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah
4. Masih adanya usaha pertambangan yang belum memenuhi kewajiban secara administratif, teknis dan finansial. Di tahun 2022, dari 166 IUP Operasi Produksi Batuan, hanya terdapat 41 IUP batuan yang memiliki dokumen RKAB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Belum optimalnya mekanisme proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pertambangan
- Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan
- Masih adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di daerah Sulawesi Tengah yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan maupun kehidupan sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi OPD dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tentunya tetap harus mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahap awal proses penyusunan rencana kerja, Dinas ESDM melakukan review terhadap rancangan awal RKPD 2024 karena harus memastikan bahwa RKPD memfasilitasi kebutuhan Dinas ESDM di tahun 2023. Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sulawesi Tengah, maka rancangan awal RKPD disandingkan dengan analisis kebutuhan Dinas ESDM, sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP	85	13.966.973.776,58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP	85	14.522.354.403	
			Persentase Realisasi Anggaran	97%				Persentase Realisasi Anggaran	97%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5				Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	30 dok	193.800.340	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9 dok	193.800.040	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	11.206.170	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	40.381.570	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.815.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9.561.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Dokumen	3.605.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14 Dokumen	6.195.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	68.509.970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	70.758.470	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	84.908.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	82.660.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen keuangan	2 dokumen	11.245.615.450	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen keuangan	2 dokumen	11.740.425.264	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	99 Orang/Bulan	11.158.395.450	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	99 Orang/Bulan	11.647.935.714	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	32.234.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	28.234.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 laporan	54.985.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 laporan	64.254.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	1 laporan	57.780.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	1 laporan	72.509.850	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	44.505.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	59.234.850	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.275.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.275.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	85.000.250	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	50.110.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	34.890.250	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	50.110.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	50.110.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1 laporan	256.070.737	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1 laporan	308.867.441	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.841.266	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	75.338.870	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	122.894.991	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	20.076.010	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9.779.840	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.577.751	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	26.942.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	12.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	12.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	102.857.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	139.430.050	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan	1.839.107.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan	1.864.241.808	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	333.463.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	330.621.808	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.503.144.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.533.620.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan	289.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan	292.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	28 unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	28 unit	252.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	39.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	39.600.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	3,75%	491.422.490	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	3,75%	491.422.150	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah Kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah	11 kab/kota	152.000.000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah Kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah	11 kab/kota	151.999.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	1 dok	32.272.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	1 dok	32.271.850	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	1 dok	92.458.000	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	1 dok	90.390.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	3 laporan	27.270.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	3 laporan	29.337.850	
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	2 kab/kota	339.422.490	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	2 kab/kota	339.422.450	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	1 dok	218.700.040	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah		Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	1 dok	218.700.200	
	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan NPA dalam daerah provinsi	2 laporan	120.722.450	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan NPA dalam daerah provinsi	2 laporan	120.722.250	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	50%	449.998.950	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	50%	449.999.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	80 IUP	299.999.350	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	80 IUP	304.600.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	1 laporan	49.999.700	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	1 laporan	38.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah laporan hasil Pengawasan kaidah teknis pertambangan yang baik dan kaidah pengusahaan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	6 laporan	249.999.650	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah laporan hasil Pengawasan kaidah teknis pertambangan yang baik dan kaidah pengusahaan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	6 laporan	266.550.000	
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah IPR dalam wilayah provinsi	30 IPR	49.999.800	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah IPR dalam wilayah provinsi	30 IPR	45.400.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	1 lap	49.999.800	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	1 lap	45.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		Jumlah IUP yang dibina dan diawasi (Dinas ESDM Prov. Sulteng)	10 IUP	99.999.800	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		Jumlah IUP yang dibina dan diawasi (Dinas ESDM Prov. Sulteng)	10 IUP	99.999.900	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	1 dok	99.999.800	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	1 dok	99.999.900	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase pembangunan EBT	6%	2.045.000.150	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase pembangunan EBT	6%	3.461.609.870	
	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		Persentasi penyediaan biomassa dan biogas dalam bauran EBT Sulawesi Tengah	4,90%	144.145.550	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		Persentasi penyediaan biomassa dan biogas dalam bauran EBT Sulawesi Tengah	4,90%	142.201.800	
	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa		Jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	75.167.800	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa		Jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	63.687.900	
	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas		Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	68.977.750	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas		Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	78.513.900	
	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun	21800 Watt	1.825.608.850	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun	21800 Watt	3.244.162.770	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	2 Laporan	47.655.850	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	2 Laporan	33.937.850	
	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EB	1 Dokumen	92.563.000	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EB	1 Dokumen	109.682.468	
	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	55 unit	1.645.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	109 unit	3.061.490.152	
	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah		Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	40.390.000	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah		Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	39.052.300	
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi		Persentasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	14,3%	75.245.750	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi		Persentasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	14,3%	75.245.300	
	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	75.245.750	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota		Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	75.245.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Rasio elektrifikasi	99,44%	3.125.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Rasio elektrifikasi	99,44%	3.524.999.930	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar	4 IUPTL	122.680.000	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar	4 IUPTL	165.234.950	
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah pelaksanaan prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 dok	25.000.000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah pelaksanaan prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 dok	144.257.450	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 laporan	97.680.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 laporan	20.977.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	75 IO	141.559.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	75 IO	137.892.500	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi	9 Laporan	141.559.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi	9 Laporan	137.892.500	
	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi		Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik	1 dok	52.873.000	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi		Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik	1 dok	36.070.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan Tenaga Listrik, RUPTL, dan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	2 laporan	52.873.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan Tenaga Listrik, RUPTL, dan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	2 laporan	36.070.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri	64 IUJPTL	60.943.000	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri	64 IUJPTL	38.857.500	
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 dokumen	25.000.000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	5 laporan	35.943.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	5 laporan	38.857.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	5,64%	2.746.945.000	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	5,64%	3.146.944.980	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1 laporan	71.945.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1 laporan	71.944.700	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	930 unit	2.675.000.000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1134 unit	3.075.000.280	

Secara umum, program dan kegiatan rancangan awal RKPD Tahun 2024 tidak begitu berbeda dengan hasil analisis kebutuhan. Namun, target capaian sub kegiatan khususnya bantuan kepada masyarakat memiliki volume yang lebih besar dalam analisis kebutuhan dikarenakan adanya proposal permintaan bantuan untuk masyarakat tidak mampu. Hal ini juga berdampak pada besarnya anggaran yang dibutuhkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah juga mempertimbangkan usulan program dan kegiatan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dapat melalui Musrenbang, forum OPD ataupun dalam bentuk proposal yang langsung diserahkan ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Usulan-usulan yang masuk merupakan usulan-usulan terkait permintaan bantuan penyambungan kwh meter gratis, permintaan bantuan pemasangan LTSHE dan permintaan bantuan pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Usulan-usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2024
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program: Pengelolaan Energi Terbarukan				
	Kegiatan: Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				
	Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				
	Fokus Belanja:				
	PJUTS	Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka Kab. Tojo Una-una	Jumlah PJUTS yang terbangun	3 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
	PJUTS	Desa Kabua-Bua Kec. Nuhon Kab. Banggai	Jumlah PJUTS yang terbangun	7 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PJUTS	Desa Sobol, Kec. Montoh, Kab. Banggai	Jumlah PJUTS yang terbangun	7 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
	PJUTS	Dusun 2, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi	Jumlah PJUTS yang terbangun	8 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
	PJUTS	Desa Sakinah Jaya Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong	Jumlah PJUTS yang terbangun	5 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
	PJUTS	Desa Marantale Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong	Jumlah PJUTS yang terbangun	7 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
	PJUTS	Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong	Jumlah PJUTS yang terbangun	6 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
	PJUTS	Desa Lemusa Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong	Jumlah PJUTS yang terbangun	3 Unit	Pokok Pikiran Hasil reses Anggota DPRD
2.	Program: Pengelolaan Ketenagalistrikan				
	Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
	Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
	Fokus Belanja:				
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Dongkalan Kec. Pagimana Kab. Banggai	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	17 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Toinasa Kec Pamona Barat Kab. Poso	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	23 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Takibangke Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	66 unit	Proposal masyarakat tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Rompi, Kec Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	13 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Cempa, Kecamatan Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	32 Unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Tampanombo, Kec Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	26 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Marowo, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	24 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Uha Uhangon Kecamatan Lobu, Kab. Banggai	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	32 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Bongka Makmur, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	30 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Bonebae II, Kec Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	38 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Rano B, Kec Balaesang Tanjung, Kab. Donggala	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	120 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Watusongo, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	9 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Paranonge, Kecamatan Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	15 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Betengon, Kec. Dondo, Kab. Tolitoli	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	30 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa Tobamawu Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-una	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	23 unit	Proposal masyarakat tahun 2023
	Pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter	Desa O'o Parese, Kec. Kulawi Selatan, Kab. Sigi	Jumlah bantuan kwhmeter gratis	47 unit	Proposal masyarakat tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur serta mendukung visi misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sector energi dan sumber daya mineral. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Demi mewujudkan visi KESDM, maka dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti)
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi
4. Menjamin ketersediaan energi nasional
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri
2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat terhadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Untuk periode 2020 – 2024 kebijakan sector ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industry. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan social di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Kementerian ESDM beserta indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis KESDM	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional
		Indeks Ketahanan Energi Nasional
2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri
3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi
4	Meningkatnya kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang kompeten dan profesional
5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Persentase realisasi PNBPN
		Persentase realisasi investasi
6	Layanan sektor ESDM yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM
7	Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan
		Indeks Implementasi Kebijakan

No	Sasaran Strategis KESDM	Indikator Kinerja Utama
8	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	Indeks Efektivitas pembinaan dan pengawasan
		Indeks maturitas SPIP
		Nilai SAKIP ESDM
9	Penelitian dan pengembangan ESDM produktif	Jumlah pemanfaatan hasil litbang
10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	Indeks reformasi birokrasi
11	Organisasi yang fit dan SDM unggul	Nilai evaluasi kelembagaan
		Indeks profesionalitas ASN
12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM

Jika ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Kementerian ESDM, maka dari beberapa sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran strategis KESDM “Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional” berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Energi Baru Terbarukan dan Bidang Ketenagalistrikan di Dinas ESDM, sasaran strategis “Optimalisasi ketersediaan produk mineral” berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Minerba serta sasaran strategis “Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi” masih berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Geologi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dari tiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan perumusan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan/ sasaran. Berikut merupakan tujuan, sasaran dan indikator tujuan/ sasaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama periode 5 (lima) tahun.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya nilai tambah produk pertambangan dan penggalian	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB	17,00%	18,00%	19%
2.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana	Meningkatnya konservasi pada cekungan air tanah	Persentase peningkatan cekungan air tanah	5	7,35%	10,50%
3.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	Meningkatnya pembangunan rendah karbon sektor energi	Porsi EBT dalam bauran energi	27%	30.51%	30.97%
		Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat secara merata, aman, andal dan ramah lingkungan	Konsumsi listrik perkapita	582	612	650

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian visi misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022
3. Pencapaian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan

Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 5 program, 20 kegiatan dan 41 sub kegiatan di dinas induk. Untuk UPT Laboratorium terdapat 1 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah I (Kabupaten Buol dan Tolitoli) terdapat 4 program, 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II (Kabupaten Poso dan Tojo Una-una) terdapat 4 program, 10 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah III (Kabupaten Morowali dan Morowali Utara) terdapat 4 program, 10 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah IV (Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut) terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah V (Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu) terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Induk)
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Sub Keg: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Sub Keg: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Keg: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2.2. Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.3. Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.2. Sub Keg: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.2. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.3. Sub Keg: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.4. Sub Keg: Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.5. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program: Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
 - 1.2. Sub Keg: Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

- 1.3. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 2.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
 - 2.2. Sub Keg: Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Program: Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 1.1. Sub Keg: Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik dan perusahaan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
 - 1.2. Sub Keg: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
 - 2.1. Sub Keg: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - 3.1. Sub Keg: Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Program: Pengelolaan Energi Terbarukan

1. Kegiatan: Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Biomassa
 - 1.2. Sub Keg: Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Biogas

2. Kegiatan: Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi
 - 2.1. Sub Keg: Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
 - 2.2. Sub Keg: Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT
 - 2.3. Sub Keg: Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT
 - 2.4. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Aneka EBT di Daerah
3. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang Dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah Provinsi
 - 3.1. Sub Keg: Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Program: Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
 - 1.2. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - 2.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3. Kegiatan: Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
 - 3.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

4. Kegiatan: Penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
 - 4.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
 5. Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 5.1. Sub Keg: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 5.2. Sub Keg: Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- UPT Pelayanan Teknis Laboratorium

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Sub Keg: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Keg: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.2. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.3. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.4. Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2. Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Cabang Dinas ESDM Wilayah I (Kabupaten Buol dan Tolitoli)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan: Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1. Sub Keg: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.2. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.3. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2. Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - 1.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 2.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2. Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 2.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

- Cabang Dinas ESDM Wilayah II (Kabupaten Poso dan Tojo Una-una)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan: Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1. Sub Keg: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.2. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.3. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2. Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - 1.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 2.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2. Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 2.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - 2.2. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

- Cabang Dinas ESDM Wilayah III (Kabupaten Morowali dan Morowali Utara)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan: Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1. Sub Keg: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.2. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.3. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - 1.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 2.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 2. Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 2.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
- Cabang Dinas ESDM Wilayah IV (Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan: Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1. Sub Keg: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.2. Sub Keg: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 2.3. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.4. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2. Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 2. Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 2.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - 2.2. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- Cabang Dinas ESDM Wilayah V (Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan: Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1. Sub Keg: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
2. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1. Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2. Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3. Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.2. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2. Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 1.1. Sub Keg: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 1.1. Sub Keg: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 29	Dinas ESDM Prov. Sulteng				22.450.386.253				26.501.500.000
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulteng	66	14.522.354.403	APBD		66	16.351.500.000
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sulteng	85	193.800.040	APBD		86	524.000.000
		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				62	
3 29 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Palu	11 Dok	40.381.570	APBD		11 Dok	74.000.000
3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja	Palu	3 laporan	70.758.470	APBD		3 laporan	200.000.000
		Jumlah dokumen aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Sulawesi Tengah	12 laporan	82.660.000	APBD		12 Laporan	250.000.000
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	Sulteng	60	11.740.425.264	APBD		62	12.545.000.000
		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				62	
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjanganannya	Palu	99 Orang/Bulan	11.647.935.714	APBD		105 Orang/Bulan	12.475.000.000
3 29 01 1.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Palu	1 laporan	28.234.750	APBD		1 laporan	40.000.000
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersusun	Palu	18 laporan	64.254.800	APBD		18 laporan	30.000.000
3 29 01 1.03 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	Sulteng	1 laporan	72.509.850	APBD		1 Laporan	100.000.000
		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				62	
3 29 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Sulteng	7 laporan	59.234.850	APBD		7 Laporan	70.000.000
		Jumlah laporan rencana kebutuhan barang milik daerah		2 Laporan				2 laporan	
3 29 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	Sulteng	1 Laporan	13.275.000	APBD		1 Laporan	30.000.000
3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Sulteng	69	50.110.000	APBD		71	60.000.000
		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				62	
3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang telah menyusun SKP	Sulteng	99 Orang	50.110.000	APBD		105 Orang/Bulan	60.000.000
		Jumlah ASN yang telah menyusun laporan kinerja harian		99 Orang				105 Orang/Bulan	
		Jumlah dokumen PMPRB		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Tarinventarisasinya data pegawai		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah dokumen ABK		1 Dokumen				1 Dokumen	
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Sulteng/ Daerah lainnya	60	308.867.441	APBD		62	597.500.000
		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				62	
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhannya	Palu	1 Unit	122.894.991	APBD		1 Unit	150.000.000
		Persentase permohonan surat menyurat yang tertayani		100%				100%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhannya	Palu	1 Unit	26.942.400	APBD		1 Unit	55.000.000
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhannya	Palu	1 Unit	12.600.000	APBD		1 Unit	25.000.000
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Palu	175 Orang	7.000.000	APBD		250 Orang	17.500.000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan koordinasi/konsultasi SKPD bidang energi dan sumber daya mineral	Sulteng/ Daerah Lainnya	100%	139.430.050	APBD		100%	350.000.000
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Palu	60	1.864.241.808	APBD		60	2.100.000.000
				Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah		60		60					
				Tingkat digitalisasi Arsip perangkat Daerah		62		62					
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	Palu	1 Unit	330.621.808	APBD		1 Unit	350.000.000
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	Palu	1 Unit	1.533.620.000	APBD		1 Unit	1.750.000.000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Palu	100%	292.400.000	APBD		100%	425.000.000
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Palu	28 unit	252.800.000	APBD		28 unit	350.000.000
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	Palu	60 unit	39.600.000	APBD		60 unit	75.000.000
3	29	02			Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	Sulteng	10,50%	491.422.150	APBD		13%	755.000.000
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase cekungan air tanah yang telah ditetapkan	Sulteng	6%	151.999.700	APBD		8%	355.000.000
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Sulteng	1 dok	32.271.850	APBD		1 Dokumen	45.000.000
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Sulteng	1 dok	90.390.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah titik lokasi pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang diawasi	Sulteng	2 titik lokasi	29.337.850	APBD		2 titik lokasi	60.000.000
				Persentase usulan persetujuan izin pemanfaatan air tanah yang ditindaklanjuti	100%	100%							
				Jumlah draft dokumen penetapan kawasan rawan bencana geologi	1 Dok	1 Dok							
3	29	01	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang telah menarik pajak air tanah dari Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditentukan dalam Perbup/Perwali	Sulteng	54%	339.422.450	APBD		70%	400.000.000
3	29	01	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Kab/kota yang tersosialisasi penetapan NPA provinsi	Sulteng	3 Kab/Kota	218.700.200	APBD		3 Kab/Kota	250.000.000
				Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	60 pelaku usaha	60 pelaku usaha							
3	29	01	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah kab/kota yang telah menindaklanjuti PERGUB NPA	Sulteng	5 Cabang Dinas	120.722.250	APBD		5 Cabang Dinas	150.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Sulteng	50%	449.999.900	APBD		60%	535.000.000
3 29 01 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah yang telah memiliki dokumen RKAB	Sulteng	30%	304.600.000	APBD		40%	340.000.000
3 29 01 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi RUPPM	Sulteng	35 Pelaku Usaha	38.050.000	APBD		45 Pelaku usaha	65.000.000
		Persentase dokumen yang terevaluasi	100%	100%					
		Persentase penerbitan surat pengantar IUP database MOD/MOMI	100%	100%					
		Persentase masalah yang tertangani	100%	100%					
		Persentase surat pengantar perintah penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang	100%	100%					
		Persentase dokumen teknis izin usaha pertambangan	100%	100%					
		Jumlah Dokumen draft blue print RUPPM	1 Dok	1 Dok					
		Persentase permohonan perizinan berusaha sektor minerba	100%	100%					
		Jumlah usulan revisi SK wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Usulan	1 Usulan					
		Persentase permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang terverifikasi	100%	100%					
3 29 01 1.03 05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Sulteng	50 Pelaku Usaha	266.550.000	APBD		75 Pelaku Usaha	275.000.000
		Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	35 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha					
3 29 01 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase usulan wilayah pertambangan rakyat yang diterbitkan	Sulteng	46%	45.400.000	APBD		60%	75.000.000
3 29 01 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah usulan wilayah pertambangan rakyat yang diterbitkan	Sulteng	5	45.400.000	APBD		5	75.000.000
3 29 03 1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase IUP Batuan yang dibina dan diawasi	Sulteng	30%	99.999.900	APBD		50%	120.000.000
3 29 03 1.24 02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha yang dievaluasi	Sulteng	20 pelaku Usaha	99.999.900	APBD		30 pelaku usaha	120.000.000
		Jumlah Izin Usaha yang dibina	20 pelaku Usaha	25 pelaku Usaha					
		Jumlah dokumen data PNB	4 Dokumen	4 Dokumen					
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	Sulteng	26,79%	3.386.364.570	APBD		30,51%	5.315.000.000
3 29 05 1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Persentase penyediaan biomassa dalam bauran EBT Sulawesi Tengah	Sulteng	4,00%	142.201.800	APBD		5%	160.000.000
		Persentase penyediaan biogas dalam bauran EBT Sulawesi Tengah	1,00%	1%					
3 29 5 1.05 01	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa	Jumlah Data Potensi Biomassa kab/kota	Sulteng	4 Kab/Kota	63.687.900	APBD		5 Kab.Kota	75.000.000
3 29 5 1.05 06	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah pelaku usaha BIOMASSA yang terbina	Sulteng	4 Pelaku usaha	78.513.900	APBD		5 Pelaku usaha	85.000.000
3 29 05 1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase pembangunan Infrastruktur EBT	Sulteng	6%	3.244.162.770	APBD		7%	5.075.000.000
3 29 05 1.07 02	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah perusahaan dalam pengelolaan EBT yang dibina	Sulteng	3 Perusahaan	33.937.850	APBD		5 Perusahaan	50.000.000
3 29 05 1.07 06	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah dokumen studi kelayakan pembangunan EB	Sulteng	1 Dokumen	109.682.468	APBD		1 Dokumen	175.000.000
		Jumlah dokumen draft Rapergub energi bersih	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah draft revisi PERDA RUED	1 Dokumen	1 Dokumen					
3 29 05 1.07 07	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah Pembangunan Infrastruktur EBT	Sulteng	102 unit	3.061.490.152	APBD		120 Unit	4.800.000.000
3 29 05 1.07 10	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah lokasi potensi aneka EBT di Daerah	Sulteng	3 Titik Lokasi	39.052.300	APBD		4 Titik Lokasi	50.000.000
		Jumlah dokumen data emisi GRK & Bauran energi	2 Dokumen	2 Dokumen					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu			
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	29	05	1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Persentase Perangkat Daerah Kab/ Kota dan Provinsi yang menerapkan manajemen energi	Sulteng	17,00%	75.245.300	APBD		20	80.000.000
3	29	05	1.10	05	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang tersosialisasi di Kabupaten/Kot Jumlah surat edaran Jumlah Pelaku Usaha yang terbina Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek	Sulteng	100PD 1 Dokumen 50 Pelaku usaha 30 Pelaku Usaha	75.245.300	APBD	100PD 1 Dokumen 70 Pelaku usaha 50 Pelaku Usaha	80.000.000
3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan	Sulteng	99,44% 100,00%	3.524.999.930	APBD		99,74% 100%	3.545.000.000
3	29	06	1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase pengawasan IUPTL	Sulteng	25%	165.234.950	APBD		35%	55.000.000
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek	Sulteng	40 Pelaku Usaha	144.257.450	APBD	50 Pelaku Usaha	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang dibina & diawasi	Sulteng	40 Pelaku Usaha	20.977.500	APBD	50 Pelaku usaha	55.000.000
3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase inspeksi keselamatan ketenagalistrikan	Sulteng	25%	137.892.500	APBD		35%	135.000.000
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha yang terawasi dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan	Sulteng	75 Pelaku usaha	137.892.500	APBD	85 Pelaku usaha	135.000.000
3	29	06	1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUPTL-U yang terawasi	Sulteng	100%	36.070.000	APBD		100%	57.500.000
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang terawasi Jumlah pelaku usaha dalam mengimplementasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik Jumlah dokumen yang dievaluasi	Sulteng	3 Pelaku usaha 1 Pelaku usaha 1 Dokumen	36.070.000	APBD	4 Pelaku Usaha 2 Pelaku Usaha 2 Dokumen	57.500.000
3	29	06	1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase pembinaan dan pengawasan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Sulteng	100%	38.857.500	APBD			40.000.000
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diawasi	Sulteng	60 Pelaku Usaha	38.857.500	APBD	70 Pelaku Usaha	40.000.000
3	29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	Sulteng	5,64%	3.146.944.980	APBD		7,64%	3.257.500.000
3	29	01	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Sulteng	1134 rumah tangga	71.944.700	APBD	1150 rumah tangga	95.000.000
3	29	01	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	Sulteng	1134 sambungan rumah	3.075.000.280	APBD	1150 Sambungan Rumah	3.162.500.000

Nama Perangkat Daerah : UPT LABORATORIUM									
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPT LABORATORIUM				Rp 299.999.930				773.734.600
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Sulteng	85	Rp 299.999.930	APBD		87	Rp 773.734.600
		Persentase Realisasi Anggaran		97%				97,50%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5				90	
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Palu	3 dok	Rp 9.875.000	APBD		3 dok	14.000.000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Palu	3 dok	Rp 9.875.000	APBD		3 dok	14.000.000
3 29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	Palu	1 laporan	Rp 2.934.600	APBD		1 laporan	2.934.600
3 29 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palu	1 dok	Rp 2.934.600	APBD		1 dok	Rp 2.934.600
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Sulteng/ Daerah lainnya	1 laporan	Rp 134.993.630	APBD		1 laporan	88.300.000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Palu	1 paket	Rp 26.042.930	APBD		1 paket	35.000.000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Palu	1 paket	Rp 4.949.700	APBD		1 paket	3.300.000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sulteng/ Daerah Lainnya	2 laporan	Rp 104.001.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Palu	1 laporan	Rp 26.296.700	APBD		1 laporan	500.000.000
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin yang disediakan	Palu	1 unit	Rp 26.296.700	APBD		2 unit	500.000.000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Palu	2 laporan	Rp 63.690.000	APBD		2 laporan	100.500.000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Palu	1 laporan	Rp 5.640.000	APBD		1 laporan	7.000.000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Palu	1 laporan	Rp 58.050.000	APBD		1 laporan	93.500.000
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Palu	1 laporan	Rp 62.210.000	APBD		1 laporan	68.000.000
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Palu	4 unit	Rp 57.050.000	APBD		4 unit	60.000.000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Palu	8 unit	Rp 5.160.000	APBD		10 unit	8.000.000

Nama Perangkat Daerah : CABANG DINAS ESDM WILAYAH I									
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I				Rp 394.349.705				Rp505.000.000
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		85				87	
		Persentase Realisasi Anggaran	Kab. Buol	97%	Rp 250.119.105	APBD		97,50%	Rp332.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5				90	
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Buol	3 dok	Rp 13.412.550	APBD		3 dok	16.000.000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Buol	3 dok	Rp 13.412.550	APBD		3 dok	16.000.000
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Sulteng/ Daerah lainnya	1 laporan	Rp 93.169.630	APBD		1 laporan	108.500.000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Buol	1 paket	Rp 19.534.280	APBD		1 paket	31.500.000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Buol	1 paket	Rp 6.054.050	APBD		1 paket	7.000.000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sulteng/ Daerah Lainnya	1 laporan	Rp 67.581.300	APBD		1 laporan	70.000.000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buol	2 laporan	Rp 73.292.400	APBD		2 laporan	Rp113.500.000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Buol	1 laporan	Rp 15.242.400	APBD		1 laporan	20.000.000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Buol	1 laporan	Rp 58.050.000	APBD		1 laporan	93.500.000
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buol	1 laporan	Rp 70.244.525	APBD		1 laporan	94.000.000
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Buol	3 unit	Rp 64.844.525	APBD		3 unit	85.000.000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Buol	8 unit	Rp 5.400.000	APBD		10 unit	9.000.000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	3,75%	Rp 35.472.200	APBD		4,17%	35.000.000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	2 kab/kota	Rp 35.472.200	APBD		2 kab/kota	35.000.000
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	2 laporan	Rp 35.472.200	APBD		2 Laporan	35.000.000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	50%	Rp 71.623.600	APBD		60%	78.000.000
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	6 WIUP	Rp 34.218.200	APBD		8 WIUP	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	1 Dok	Rp 34.218.200	APBD		1 Dok	35.000.000
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	18 IUP	Rp 37.405.400	APBD		20 IUP	43.000.000
3	29	01	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	2 laporan	Rp 37.405.400	APBD		2 laporan	43.000.000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	99,44%	Rp 37.134.800	APBD		99,74%	60.000.000
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	5 IO	Rp 14.852.400	APBD		5 IO	25.000.000
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	3 Laporan	Rp 14.852.400	APBD		4 Laporan	25.000.000
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	5,64%	Rp 22.282.400	APBD		7,64%	35.000.000
3	29	01	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Kab. Buol dan Kab. Tolitoli	1 Dok	Rp 22.282.400	APBD		1 Dok	35.000.000

Nama Perangkat Daerah : CABANG DINAS ESDM WILAYAH II									
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II				Rp 394.349.825				Rp 542.500.000
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		85				87	
		Persentase Realisasi Anggaran	Kab. Poso	97%	Rp 321.013.825	APBD		97,50%	430.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5				90	
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Poso	3 dok	Rp 520.000	APBD		3 dok	4.500.000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Poso	2 dok	Rp 520.000	APBD		2 dok	4.500.000
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Sulteng/ Daerah lainnya	1 laporan	Rp 105.589.950	APBD		1 laporan	155.000.000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Poso	1 paket	Rp 7.803.700	APBD		1 paket	55.000.000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Poso	1 paket	Rp 19.720.250	APBD		1 paket	20.000.000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sulteng/ Daerah Lainnya	1 laporan	Rp 78.066.000	APBD		1 laporan	80.000.000
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Poso	1 laporan	Rp 22.220.000	APBD		1 laporan	35.000.000
3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Poso	1 unit	Rp 22.220.000	APBD		1 unit	35.000.000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Poso	1 laporan	Rp 120.198.675	APBD		1 laporan	143.500.000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Poso	1 laporan	Rp 37.194.000	APBD		1 laporan	50.000.000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Poso	1 laporan	Rp 83.004.675	APBD		1 laporan	93.500.000
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Poso	1 laporan	Rp 72.485.200	APBD		1 laporan	92.000.000
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Poso	3 unit	Rp 69.115.200	APBD		3 unit	85.000.000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Poso	5 unit	Rp 3.370.000	APBD		7 unit	7.000.000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	3,75%	Rp 18.956.000	APBD		4,17%	35.000.000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 kab/kota	Rp 18.956.000	APBD		2 kab/kota	35.000.000
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 Laporan	Rp 18.956.000	APBD		2 Laporan	35.000.000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	50%	Rp 36.784.000	APBD		60%	65.000.000
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	6 WIUP	Rp 23.800.000	APBD		8 WIUP	20.000.000
3 29 03 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen WIUP Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil yang ditentukan dan ditetapkan	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	1 dok	Rp 23.800.000	APBD		1 dok	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	18 IUP	Rp 12.984.000	APBD		20 IUP	45.000.000
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	1 laporan	Rp 12.984.000	APBD		2 laporan	45.000.000
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	99,44%	Rp 17.596.000	APBD		99,74%	12.500.000
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 IO	Rp 2.480.000	APBD		2 IO	12.500.000
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	1 Laporan	Rp 2.480.000	APBD		1 Laporan	12.500.000
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	5,64%	Rp 15.116.000	APBD		7,64%	45.000.000
3 29 01 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	1 dokumen	Rp 3.792.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
3 29 01 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	1 laporan	Rp 11.324.000	APBD		1 laporan	20.000.000

Nama Perangkat Daerah : CABANG DINAS ESDM WILAYAH III									
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III				Rp 419.349.954				Rp 619.500.000
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Kab. Morowali	85	Rp 347.174.954	APBD		87	464.500.000
		Persentase Realisasi Anggaran		97%				97,50%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5				90	
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Morowali	3 dok	Rp 1.560.000	APBD		3 dok	5.000.000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Morowali	2 dok	Rp 1.560.000	APBD		2 dok	5.000.000
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Kab. Morowali	1 laporan	Rp 56.966.954	APBD		1 laporan	87.000.000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Morowali	1 paket	Rp 11.644.804	APBD		1 paket	29.000.000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Morowali	1 paket	Rp 1.781.150	APBD		1 paket	3.000.000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sulteng/ Daerah Lainnya	1 laporan	Rp 43.541.000	APBD		1 laporan	55.000.000
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Morowali	1 laporan	Rp 39.300.000	APBD		1 laporan	110.000.000
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin yang disediakan	Kab. Morowali	2 unit	Rp 39.300.000	APBD		3 unit	110.000.000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Morowali	1 laporan	Rp 178.378.000	APBD		1 laporan	190.000.000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Morowali	1 laporan	Rp 23.328.000	APBD		1 laporan	30.000.000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Morowali	1 laporan	Rp 155.050.000	APBD		1 laporan	160.000.000
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Morowali	1 laporan	Rp 70.970.000	APBD		1 laporan	72.500.000
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Morowali	4 unit	Rp 70.970.000	APBD		4 unit	72.500.000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	Kab. Morowali dan Morowali Utara	3,75%	Rp 9.820.000	APBD		4,17%	40.000.000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	Kab. Morowali dan Morowali Utara	2 kab/kota	Rp 9.820.000	APBD		2 kab/kota	40.000.000
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Kab. Morowali dan Morowali Utara	4 Laporan	Rp 9.820.000	APBD		4 Laporan	40.000.000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Kab. Morowali dan Morowali Utara	50%	Rp 42.295.000	APBD		60%	67.500.000
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	Kab. Morowali dan Morowali Utara	6 WIUP	Rp 11.885.000	APBD		8 WIUP	27.500.000
3 29 03 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen WIUP Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil yang ditentukan dan ditetapkan	Kab. Morowali dan Morowali Utara	1 dok	Rp 11.885.000	APBD		1 dok	27.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Kab. Morowali dan Morowali Utara	18 IUP	Rp 30.410.000	APBD		20 IUP	40.000.000
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kab. Morowali dan Morowali Utara	6 laporan	Rp 30.410.000	APBD		7 laporan	40.000.000
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi	Kab. Morowali dan Morowali Utara	99,44%	Rp 20.060.000	APBD		99,74%	47.500.000
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Morowali dan Morowali Utara	6 IO	Rp 9.810.000	APBD		10 IO	25.000.000
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Morowali dan Morowali Utara	3 Laporan	Rp 9.810.000	APBD		4 Laporan	25.000.000
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	Kab. Morowali dan Morowali Utara	5,64%	Rp 10.250.000	APBD		7,64%	22.500.000
3 29 01 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Kab. Morowali dan Morowali Utara	1 dok	Rp 10.250.000	APBD		1 dok	22.500.000

Nama Perangkat Daerah : CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV									
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV				Rp 394.349.666				Rp 590.956.000
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		85				87	
		Persentase Realisasi Anggaran	Kab. Banggai	97%	Rp 319.622.316	APBD		97,50%	398.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5				90	
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Banggai	3 dok	Rp 1.851.450	APBD		3 dok	24.000.000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Banggai	2 dok	Rp 1.851.450	APBD		2 dok	24.000.000
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Kab. Banggai	1 laporan	Rp 170.760.666	APBD		1 laporan	181.000.000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Banggai	1 paket	Rp 9.608.796	APBD		1 paket	22.000.000
3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Banggai	1 paket	Rp 2.457.020	APBD		1 paket	4.000.000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Banggai	1 paket	Rp 1.069.850	APBD		1 paket	5.000.000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sulteng/ Daerah Lainnya	1 laporan	Rp 157.625.000	APBD		1 laporan	150.000.000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Banggai	1 laporan	Rp 84.520.200	APBD		1 laporan	95.000.000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Banggai	1 laporan	Rp 29.170.200	APBD		1 laporan	35.000.000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Banggai	1 laporan	Rp 55.350.000	APBD		1 laporan	60.000.000
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Banggai	1 laporan	Rp 62.490.000	APBD		1 laporan	98.000.000
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Banggai	4 unit	Rp 56.400.000	APBD		4 unit	90.000.000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Banggai	9 unit	Rp 6.090.000	APBD		10 unit	8.000.000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	3,75%	Rp 15.794.850	APBD		4,17%	40.000.000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	3 kab/kota	Rp 15.794.850	APBD		3 kab/kota	40.000.000
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	3 Laporan	Rp 15.794.850	APBD		3 Laporan	40.000.000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	50%	Rp 32.872.500	APBD		60%	55.456.000
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	18 IUP	Rp 32.872.500	APBD		20 IUP	55.456.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	10 laporan	Rp 32.872.500	APBD		10 laporan	55.456.000
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	99,44%	Rp 26.060.000	APBD		99,74%	97.500.000
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	6 IO	Rp 6.857.500	APBD		8 IO	20.000.000
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	3 Laporan	Rp 6.857.500	APBD		4 Laporan	20.000.000
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	5,64%	Rp 19.202.500	APBD		7,64%	77.500.000
3 29 01 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	1 dok	Rp 9.867.500	APBD		1 dok	55.000.000
3 29 01 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	1 laporan	Rp 9.335.000	APBD		1 laporan	22.500.000

Nama Perangkat Daerah : CABANG DINAS ESDM WILAYAH V									
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V				Rp 394.349.825				Rp 551.000.000
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Kab. Sigi	85	Rp 334.018.925	APBD		87	416.000.000
		Persentase Realisasi Anggaran		97%				97,50%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5				90	
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Sigi	3 dok	Rp 876.400	APBD		3 dok	9.000.000
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Sigi	2 dok	Rp 876.400	APBD		2 dok	9.000.000
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Kab. Sigi	1 laporan	Rp 45.119.250	APBD		1 laporan	76.000.000
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Sigi	1 paket	Rp 23.839.050	APBD		1 paket	39.000.000
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kab. Sigi	1 paket	Rp 2.055.200	APBD		1 paket	7.000.000
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	1 laporan	Rp 19.225.000	APBD		1 laporan	30.000.000
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Sigi	1 laporan	Rp 66.708.600	APBD		1 laporan	90.000.000
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin yang disediakan	Kab. Sigi	5 unit	Rp 66.708.600	APBD		3 unit	90.000.000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sigi	1 laporan	Rp 170.724.675	APBD		1 laporan	185.000.000
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sigi	1 laporan	Rp 27.720.000	APBD		1 laporan	35.000.000
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Sigi	1 laporan	Rp 143.004.675	APBD		1 laporan	150.000.000
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sigi	1 laporan	Rp 50.590.000	APBD		1 laporan	56.000.000
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sigi	3 unit	Rp 47.950.000	APBD		3 unit	50.000.000
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sigi	4 unit	Rp 2.640.000	APBD		6 unit	6.000.000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	3,75%	Rp 17.875.000	APBD		4,17%	35.000.000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	4 kab/kota	Rp 17.875.000	APBD		4 kab/kota	35.000.000
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	4 Laporan	Rp 17.875.000	APBD		4 Laporan	35.000.000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	50%	Rp 16.309.550	APBD		60%	55.000.000
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	18 IUP	Rp 16.309.550	APBD		20 IUP	55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kab. Donggala, Parimo & Kota Palu	3 laporan	Rp 16.309.550	APBD		3 laporan	55.000.000
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	99,44%	Rp 26.146.350	APBD		99,74%	45.000.000
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	5,64%	Rp 26.146.350	APBD		7,64%	45.000.000
3 29 01 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Kab. Sigi, Donggala, Parimo & Kota Palu	1 dok	Rp 26.146.350	APBD		1 dok	45.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mengajukan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 24.747.135.158,-. Adapun rincian dari program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2024

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 29	Dinas ESDM Prov. Sulteng				22.450.386.253		
		3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	66	14.522.354.403	Sekretariat	Sulteng
		3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85	193.800.040	Sekretariat	Sulteng
			Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				
		3 29 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		11 Dok	40.381.570	Sekretariat	Palu
		3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja		3 laporan	70.758.470	Sekretariat	Palu
			Jumlah dokumen aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca		1 Dokumen				
			Jumlah Dokumen		1 Dokumen				
		3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja		12 laporan	82.660.000	Sekretariat	Sulawesi Tengah
		3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		60	11.740.425.264	Sekretariat	Sulteng
			Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				
		3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan		99 Orang/Bulan	11.647.935.714	Sekretariat	Palu
		3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun		1 laporan	28.234.750	Sekretariat	Palu
		3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersusun		18 laporan	64.254.800	Sekretariat	Palu
		3 29 01 1.03 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah		1 laporan	72.509.850	Sekretariat	Sulteng
			Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				
		3 29 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah		7 laporan	59.234.850	Sekretariat	Sulteng
			Jumlah laporan rencana kebutuhan barang milik daerah		2 Laporan				
		3 29 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah		1 Laporan	13.275.000	Sekretariat	Sulteng
		3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		69	50.110.000	Sekretariat	Sulteng
			Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah		60				
		3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang telah menyusun SKP		99 Orang	50.110.000	Sekretariat	Sulteng
			Jumlah ASN yang telah menyusun laporan kinerja harian		99 Orang				
			Jumlah dokumen PMPRB		1 Dokumen				
			Terinventarisasinya data pegawai		1 Dokumen				
				Jumlah dokumen ABK		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2024				
								Target	Rp			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
		3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	60	308.867.441	Sekretariat	Sulteng/ Daerah lainnya	
							Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60				
		3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhannya	1 Unit	122.894.991	Sekretariat	Palu
							Persentase permohonan surat menyurat yang terlayani	100%				
		3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhannya	1 Unit	26.942.400	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraluran Perundang-undangan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhannya	1 Unit	12.600.000	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	175 Orang	7.000.000	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan koordinasi/ konsultasi SKPD bidang energi dan sumber daya mineral	100%	139.430.050	Sekretariat	Sulteng/ Daerah Lainnya
		3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	60	1.864.241.808	Sekretariat	Palu
								Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	60			
								Tingkat digitalisasi Arsip perangkat Daerah	62			
		3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	1 Unit	330.621.808	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	1 Unit	1.533.620.000	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	292.400.000	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	28 unit	252.800.000	Sekretariat	Palu
		3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	60 unit	39.600.000	Sekretariat	Palu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024					
						Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3 29 02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan		10,50%	491.422.150	Bidang Geologi	Sulteng		
		3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase cekungan air tanah yang telah ditetapkan		6%	151.999.700	Bidang Geologi	Sulteng		
		3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		1 dok	32.271.850	Bidang Geologi	Sulteng		
		3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 dok	1 dok	90.390.000	Bidang Geologi	Sulteng		
		3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah titik lokasi pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang diawasi		2 titik lokasi	29.337.850	Bidang Geologi	Sulteng		
	Persentase usulan persetujuan izin pemanfaatan air tanah yang ditindaklanjuti				100%						
	Jumlah draft dokumen penetapan kawasan rawan bencana geologi				1 Dok						
		3 29 01 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang telah menarik pajak air tanah dari Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditentukan dalam Perbup/Perwali		54%	339.422.450	Bidang Geologi	Sulteng		
		3 29 01 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Kab/kota yang tersosialisasi penetapan NPA provinsi		3 Kab/Kota	218.700.200	Bidang Geologi	Sulteng		
				Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi		60 pelaku usaha					
		3 29 01 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah kab/kota yang telah menindaklanjuti PERGUB NPAI		5 Cabang Dinas	120.722.250	Bidang Geologi	Sulteng		
		3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik		50%	449.999.900	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng		
		3 29 01 1.03 02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase IUP operasi produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah yang telah memiliki dokumen RKAB		30%	304.600.000	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng		
				Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi RIPPMM		35 Pelaku Usaha					
				Persentase dokumen yang terevaluasi		100%					
				Persentase penerbitan surat pengantar IUP database MODI/MOMI		100%					
				Persentase masalah yang tertangani		100%					
				Persentase surat pengantar perintah penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang		100%					
				Persentase dokumen teknis izin usaha pertambangan		100%					
				Jumlah Dokumen draft blue print RIPPMM		1 Dok					
				Persentase permohonan perizinan berusaha sektor minerba		100%					
				Jumlah usulan revisi SK wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah		1 Usulan					
				Persentase permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang terverifikasi		100%					
				3 29 01 1.03 05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah pelaku usaha yang diawasi		50 Pelaku Usaha	266.550.000	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng
				Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi		35 Pelaku Usaha					
		3 29 01 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase usulan wilayah pertambangan rakyat yang diterbitkan	0	46%	45.400.000	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng		
		3 29 01 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah usulan wilayah pertambangan rakyat yang diterbitkan		5	45.400.000	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng		
		3 29 03 1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase IUP Batuan yang dibina dan diawasi		30%	99.999.900	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng		
		3 29 03 1.24 02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha yang dievaluasi		20 pelaku Usaha	99.999.900	Bidang Mineral dan Batubara	Sulteng		
				Jumlah Izin Usaha yang dibina		20 pelaku Usaha					
				Jumlah dokumen data PNB		4 Dokumen					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi		26,79%	3.461.609.870	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Persentase penyediaan biomassa dalam bauran EBT Sulawesi Tengah		4,00%	142.201.800	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.05 01	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa	Jumlah Data Potensi Biomassa kab/kota	4 Kab/Kota		63.687.900	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.05 06	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah pelaku usaha BIOMASSA yang terbina	4 Pelaku usaha				
		3 29 05 1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase pembangunan Infrastruktur EBT		6%	3.244.162.770	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.07 02	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah perusahaan dalam pengelolaan EBT yang dibina	3 Perusahaan		33.937.850	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.07 06	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah dokumen studi kelayakan pembangunan EB	1 Dokumen		109.682.468	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.07 07	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah draft revisi PERDA RUED	1 Dokumen				
		3 29 05 1.07 10	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah Pembangunan infrastruktur EBT	102 unit		3.061.490.152	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah lokasi potensi aneka EBT di Daerah	3 Titik Lokasi		39.052.300	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 05 1.10 05	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah dokumen data emisi GRK & Bauran energi	2 Dokumen				
		3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Perangkat Daerah Kab/ Kota dan Provinsi yang menerapkan manajemen energi		17,00%	75.245.300	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang tersosialisasi di Kabupaten/Kot	100PD				
		3 29 06 1.01 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat edaran	1 Dokumen		75.245.300	Bidang Energi Baru Terbarukan	Sulteng
		3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang terbina	50 Pelaku usaha				
		3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek	30 Pelaku Usaha				
		3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rasio elektrifikasi	99%	99,44%	3.524.999.930	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 06 1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan		100,00%			
		3 29 06 1.04 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase pengawasan IUPTL		25%	165.234.950	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 06 1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek	40 Pelaku Usaha		144.257.450	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 06 1.05 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang dibina & diawasi	40 Pelaku Usaha		20.977.500	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase inspeksi keselamatan ketenagalistrikan		25%	137.892.500	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pelaku usaha yang terawasi dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan	75 Pelaku usaha		137.892.500	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase pemegang IUPTL-U yang terawasi	0	100%	36.070.000	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah pelaku usaha yang terawasi	3 Pelaku usaha				
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah pelaku usaha dalam mengimplementasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik	1 Pelaku usaha		36.070.000	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen yang dievaluasi	1 Dokumen				
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase pembinaan dan pengawasan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri		100%	38.857.500	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diawasi	60 Pelaku Usaha		38.857.500	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	0,48%	5,64%	3.146.944.980	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1134 rumah tangga		71.944.700	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng
		3 29 01 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	628 unit	1134 sambungan rumah	3.075.000.280	Bidang Ketenagalistrikan	Sulteng

- Cabang Dinas ESDM Wilayah I

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2024						
						Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I					394.349.705					
		3	29	01								
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5%	250.119.105	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol	
		3	29	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai ketentuan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah I	100%	13.412.550	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol	
		3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dok	13.412.550	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
								Jumlah laporan kinerja	1 Laporan			
		3	29	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawalan dan administrasi surat menyurat yang tepat waktu di Cabang Dinas ESDM Wilayah I	100%	93.169.630	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol	
		3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase permohonan surat menyurat yang terlayani	100%	19.534.280	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
								Jumlah unit kerja yang terpenuhi	1 unit			
		3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	1 Unit	6.054.050	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
		3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	67.581.300	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol, Kota Palu
		3	29	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa penunjangnya di Cabang Dinas ESDM Wilayah I	100%	73.292.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol	
		3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	1 Unit	15.242.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
		3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	2 Unit	58.050.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
		3	29	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas ESDM Wilayah I	100%	70.244.525	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol	
		3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	64.844.525	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
		3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	8 unit	5.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol
		3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase pelaku usaha air tanah yang diawasi dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah I	3,75%	35.472.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Toitoli	
		3	29	01	1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha air tanah yang diawasi dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I	80%	35.472.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Toitoli	
		3	29	01	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah SOP/juknis	1 SOP	35.472.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Toitoli
							Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	20 pelaku usaha				
							Jumlah pelaku usaha air tanah yang terawasi	5 pelaku usaha				
							Jumlah pelaku usaha air tanah yang terawasi	2 pelaku usaha				
		3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah I	50%	71.623.600	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Toitoli	
		3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase WIUP mineral bukan logam dan batuan yang terdata dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah I	100%	34.218.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Toitoli	
		3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan	1 Dok	34.218.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Toitoli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 29 01 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terawasi yang Berada Dalam Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah I		100%	37.405.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli
		3 29 01 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi pengelolaan WPR		20 pelaku usaha	37.405.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli
				Jumlah izin mineral bukan logam dan batuan yang diawasi		5 izin			
				Jumlah izin mineral bukan logam dan batuan yang diawasi		3 izin			
		3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi di Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah I		99,44%	37.134.800	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli
				Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I		100,00%			
		3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemilik izin operasi usaha ketenagalistrikan yang diawasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I		70%	14.852.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli
		3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin operasi yang diawasi		6 izin operasi	14.852.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli
		3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase kebutuhan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang terpenuhi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I		20,00%	22.282.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli
		3 29 01 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu		1 Dok	22.282.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Kab. Buol dan Tolitoli

- Cabang Dinas ESDM Wilayah II

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II						394.349.825		
		3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,50	321.013.825	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang sesuai ketentuan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 dok	520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian dan administrasi surat menyurat yang tepat waktu di Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	105.589.950	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase permohonan surat menyurat yang terlayani Jumlah unit kerja yang terpenuhi Target 1 Unit		100%	7.803.700	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	19.720.250	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Jumlah dokumen evaluasi		1 Dokumen 4 Dokumen	78.066.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso, Kota Palu	
		3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi di Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	22.220.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional		1 unit	22.220.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa penunjangnya di Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	120.198.675	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit	37.194.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit	83.004.675	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	72.485.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		3 unit	69.115.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		5 unit	3.370.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso	
		3 29 02	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase pengendalian pemanfaatan air tanah yang sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II		3,75%	18.956.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna	
		3 29 01 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha air tanah yang diawasi dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II		80%	18.956.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna	
		3 29 01 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah SOP/juknis Jumlah pelaku usaha air tanah yang terawasi Jumlah bantuan sumur air tanah yang terawasi		1 SOP 10 pelaku usaha 4 LOKASI	18.956.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna	
		3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II		50%	36.784.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna	
		3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdata dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	23.800.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna	
		3 29 03 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan Jumlah dokumen data PETI		1 dokumen 1 dokumen	23.800.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna	

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3	29 01 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terawasi yang Berada Dalam Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II		100%	12.984.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
		3	29 01 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang diawasi Target: 6 IUP		6 IUP	12.984.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
		3	29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II		100%	17.596.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
					Rasio elektrifikasi di Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II		99.44%			
		3	29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemilik izin operasi usaha ketenagalistrikan yang diawasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II		70%	2.480.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
		3	29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin operasi yang diawasi		4 izin operasi	2.480.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
		3	29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase kebutuhan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang terpenuhi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II		20%	15.116.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
		3	29 01 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu		1 dokumen	3.792.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna
		3	29 01 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang terawasi pemasangan instalasi listriknya		20 rumah tangga	11.324.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Kab. Poso dan Touna

- Cabang Dinas ESDM Wilayah III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III					419.349.954		
		3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5	347.174.954	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai ketentuan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah III		100%	1.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 dok	1.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian dan administrasi surat menyurat yang tepat waktu di Cabang Dinas ESDM Wilayah III		100%	56.966.954	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	11.644.804	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
				Persentase permohonan surat menyurat yang terlayani		100%			
		3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	1.781.150	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen		1 Dokumen	43.541.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali, Kota Palu
		3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi di Cabang Dinas ESDM Wilayah III		100%	39.300.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya		2 unit	39.300.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa penunjangnya di Cabang Dinas ESDM Wilayah III		100%	178.378.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	23.328.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	155.050.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas ESDM Wilayah III		100%	70.970.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		4 unit	70.970.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali
		3 29 02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pengendalian pemanfaatan air tanah yang sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III		3,75%	9.820.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut
		3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha air tanah yang diawasi dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah III		80%	9.820.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut
		3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah SOP/juknis		1 SOP	9.820.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut
				Jumlah pelaku usaha air tanah yang terawasi		3 pelaku usaha			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Target	Rp			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	
		3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah III		50%	42.295.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut	
		3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdata dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah III	100%	11.885.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut	
		3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan	1 dok	11.885.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut
		3	29	03	1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terawasi yang Berada Dalam Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah III	100%	30.410.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut	
		3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan Target 1 dokumen	1 Dokumen	30.410.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut
							Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang diawasi	4 IUP				
		3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi		99,44%	20.060.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut	
						Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III	100%					
		3	29	06	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemilik izin operasi usaha ketenagalistrikan yang diawasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	70%	9.810.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut	
		3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin operasi yang diawasi	3 Izin	9.810.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut
		3	29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase kebutuhan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang terpenuhi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	20%	10.250.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut	
		3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dok	10.250.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Kab. Morowali dan Morut

• Cabang Dinas ESDM Wilayah IV

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV					394.349.666		
		3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,5%	319.622.316	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai ketentuan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		100%	1.851.450	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 dok	1.851.450	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
				Jumlah dokumen evaluasi		4 dok			
				Jumlah laporan kinerja		1 laporan			
		3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawalan dan administrasi surat menyurat yang tepat waktu di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		100%	170.760.666	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase permohonan surat menyurat yang terlayani		100%	9.608.796	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
				Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit			
		3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit	2.457.020	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit	1.069.850	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen		1 dok	157.625.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Kota Palu
		3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa penunjangnya di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		100%	84.520.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit	29.170.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 unit	55.350.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		100%	62.490.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		4 unit	56.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		9 unit	6.090.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai
		3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase pengendalian pemanfaatan air tanah yang sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV		3,75%	15.794.850	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha air tanah yang diawasi dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		80%	15.794.850	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah SOP/juknis		1 SOP	15.794.850	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
				Jumlah pelaku usaha air tanah yang terawasi		10 pelaku usaha			
		3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaedah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		50%	32.872.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terawasi yang Berada Dalam Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		100%	32.872.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang diawasi		19 IUP			
				Jumlah dokumen data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan		1 dok	32.872.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi di Wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		99,44%	26.060.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
				Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV		100,00%			
		3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemilik izin operasi usaha ketenagalistrikan yang diawasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		70%	6.857.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin operasi yang diawasi		4 izin operasi	6.857.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase kebutuhan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang terpenuhi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV		20,00%	19.202.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu		1 dok	9.867.500	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut
		3 29 06 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah lokasi pembangunan PLTS terpusat yang dievaluasi		1 lokasi	9.335.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Kab. Banggai, Bangkep, Balut

- Cabang Dinas ESDM Wilayah V

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V							378.040.275		
		3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,50	334.018.925	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai ketentuan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah V		100%	876.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 dok	876.400	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
				Jumlah dokumen evaluasi		4 Dok			
				Jumlah laporan kinerja		1 laporan			
		3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawalan dan administrasi surat menyurat yang tepat waktu di Cabang Dinas ESDM Wilayah V		100%	45.119.250	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase permohonan surat menyurat yang terlayani		100%	23.839.050	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
				Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit			
		3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	2.055.200	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen		1 laporan	19.225.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Kota Palu
		3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi di Cabang Dinas ESDM Wilayah V		100%	66.708.600	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya		5 unit	66.708.600	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa penunjangnya di Cabang Dinas ESDM Wilayah V		100%	170.724.675	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	27.720.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi		1 Unit	143.004.675	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas ESDM Wilayah V		100%	50.590.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
		3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		3 unit	47.950.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi
				Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		4 unit			
		3 29 02	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase pengendalian pemanfaatan air tanah yang sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V		3,75%	17.875.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Kota Palu
		3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha air tanah yang diawasi dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V		80%	17.875.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
		3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah SOP/juknis		1 SOP	17.875.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
				Jumlah pelaku usaha air tanah yang terawasi		14 pelaku Usaha			
		3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertimbangan yang baik		50%	-	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
		3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terawasi yang Berada Dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V		100%	-	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
		3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang diawasi		6 IUP	16.309.550	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
				Jumlah dokumen data PETI		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		3	6				7	8		
		3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		99,44%	26.146.350	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
		3	29	06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase kebutuhan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik yang terpenuhi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	20,00%	26.146.350	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu
		3	29	06	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dokumen	26.146.350	Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program dan kegiatan tetap memperhatikan keterpaduan antar kegiatan, antar program dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan provinsi dengan mempedomani peraturan – peraturan yang berlaku.

Adapun rencana tindak lanjut dari perencanaan kerja Dinas ESDM yaitu:

- Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang ditempuh dapat melalui Pendidikan formal maupun informal yang dapat menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- Penerapan system *reward* and *punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar proses pembangunan dapat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- Meningkatkan peran *stakeholder* baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud.